



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUNDIHARNO
2. Jabatan : DIREKTUR PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN MANAJEMEN RISIKO
3. NHK : 216986

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.393.287.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m²/450 m² di KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 3.586.987.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m²/120 m² di PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 715.450.000
3. Tanah Seluas 3370 m² di PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 690.850.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 501 m²/250 m² di PEMALANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 686.750.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, BMW JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 416.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.100.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 298.315.000



| | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 912.495.119 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 974.564.024 |
| Sub Total | Rp. | 10.318.511.143 |
| III. HUTANG | Rp. | 863.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 9.455.511.143 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.